



Singbebas Tak Bakal Raih WTP?

DPD RI Fasilitasi Penyelesaian Aset

SAMBAS. Kota Singkawang, Kabupaten Bengkayang, dan Sambas (Singbebas) tidak akan pernah meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pengelolaan keuangan. Pasalnya, hingga saat ini status aset ketiga daerah tidak kunjungan beres.

Untuk menyelesaikan permasalahan aset di Singbebas, Rabu (11/6), Komite IV DPD RI berkunjung ke Kabupaten Sambas dan melakukan audiensi bersama Pemkab Sambas menghadirkan BPK RI Perwakilan Kalbar, dan Inspektorat Kalbar di Aula Utama Bappeda Kabupaten Sambas.

Audiensi membahas tindak lanjut Hasil Pemeriksaan (Hapsem) II BPK TA 2013, karena masih ada permasalahan di Singbebas yang perlu diselesaikan, terutama masalah aset. Meski sudah pernah dibahas di DPRD Sambas, masalah aset daerah menyebabkan Singbebas terkendala untuk meraih WTP. Padahal, tahun 2007 Sambas pernah meraih WTP pertama di Kalbar dan menjadi percontohan.

Audensi dilaksanakan berdasarkan surat Sekjen DPD RI Nomor HM.310/297/DPD/VI/2014 tanggal 3 Juni 2014, bahwa DPD RI akan berkunjung ke Kabupaten Sambas. Materi yang dibahas mengenai pengelolaan pendapatan retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Gangguan (UG) Kabupaten Sambas tahun 2012 yang sampai saat ini belum diterbitkan. Selain itu, pengelolaan piutang retribusi Tempat

Pelelangan Ikan (TPI) yang tidak memadai, pengelolaan aset tetap Pemkab Sambas belum memadai, dan tidak tepatnya beasiswa yang direalisasikan di BKD.

Wakil Bupati Sambas Dr Pabali Musa MAg berterimakasih kepada DPD RI yang berupaya membantu menyelesaikan masalah keuangan dan aset dengan menggelar audiensi. "Kita berharap dari audiensi yang telah dilaksanakan Komite IV DPD RI di Singbebas dapat menyelesaikan permasalahan aset," harapnya.

Sementara itu, Sekda Sambas Drs H Jamiat Akadol MSI MH mengakui masih ada aset tetap yang belum dilimpahkan ke Pemkot Singkawang. Sebelumnya, Pemkab Sambas sudah menyerahkan aset pada tanggal 16 Juli 2012, dan sisanya masih dibahas di DPRD. "Mengenai beasiswa, tugas belajar ini sudah kita bahas. Bahkan dari BKD sudah melakukan koordinasi, dan tidak lagi dilaksanakan seperti tahun sebelumnya. Ini mengacu instruksi Menpan RI," ungkapnya.

Ia memaparkan, masalah aset dimulai dari adanya pemekaran. Sehingga seluruh aset dan SDM berpindah. Dalam setiap pemekaran daerah, aset selalu menjadi kendala. Apalagi Kabupaten Sambas otonomi bersama 27 provinsi lain se-Indonesia. "Kawan-kawan BPK yang membantu dan mengambil inisiatif mempertemukan tiga daerah, yaitu Sambas, Singkawang dan Bengkayang, sehingga masalah aset perlahan



Komite IV DPD RI melaksanakan audiensi membahas keuangan dan aset Kabupaten Sambas di Aula Bappeda Sambas, yang menghadirkan BPK RI Perwakilan Kalbar dan Inspektorat Kalbar. M RINHO

bisa diselesaikan," jelasnya.

Ketua DPRD Sambas, H Mas'ud Sulaiman menyambut baik kunjungan DPD RI untuk menyelesaikan permasalahan aset dan keuangan daerah. Dikatakannya, masalah aset memang gampang-gampang susah. Ia memastikan komitmen DPRD Sambas mengenai masalah aset daerah. "Sebelum akhir jabatan DPRD, ini (aset daerah, red) sudah harus selesai, karena masalah aset yang belum diselesaikan Sambas untuk mengejar WTP," tegasnya.

Di tempat yang sama, Anggota DPD RI Erma Suryani Ranik yang menjadi moderator audiensi Komite IV DPD RI mengatakan, audiensi yang dilakukan DPD RI untuk membantu memfasilitasi penyelesaian aset. "Sebelumnya, kita melakukan kunjungan kerja di Kota Singkawang, Bengkayang dan saat ini ke Sambas. Tujuannya agar permasalahan aset bisa selesai, karena kendala Sambas hanya aset. Sedangkan dari sisi keuangan, Kabupaten Sambas lebih baik dari Sing-

kawang dan Bengkayang," kata Erma kepada wartawan ditemui usai audiensi.

Dari hasil pertemuan ini, ujar Erma, selanjutnya tinggal pemerintah daerah setempat yang menyelesaikannya, karena masalah aset ini sangat penting untuk dibahas. "Seperti yang disampaikan Inspektorat Provinsi Kalbar, bahwa sebenarnya Sambas merupakan daerah pertama di Kalbar yang mendapat WTP tahun 2006-2007. Bahkan Sambas sempat menjadi percontohan daerah lain di Kalbar," ungkap Anggota DPD RI Perwakilan Kalbar ini.

Terpisah, Kepala Sub Auditorat 1 BPK Kalbar, Petris Sihombing menyampaikan saran agar masalah aset segera dibenahi. Ia berharap, Pemkab Sambas segera membenahi aset daerahnya. "Inilah kendala utama Kabupaten Sambas mendapatkan WTP. Jadi saran saya, agar Pemkab Sambas segera membenahi masalah aset, agar ke depan dapat kembali mengejar WTP," jelasnya. (edo)